

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* kini telah menjadi salah satu isu paling krusial di panggung global. *AI* tidak lagi sekedar inovasi dalam teknologi komputer, sebaliknya, *AI* telah berkembang menjadi teknologi serbaguna yang berpotensi mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor pertahanan dan militer. Di lingkungan militer, pemanfaatan *AI* telah meluas, misalnya dalam mendukung pengambilan keputusan strategis, operasi pengawasan dan intelijen, serta pengembangan senjata otonom. Berkat kemampuannya untuk memproses data dalam jumlah besar, menerapkan pembelajaran mesin dan melakukan analisis prediktif, *AI* dianggap mampu meningkatkan efektivitas operasi militer, mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi deteksi ancaman dibandingkan dengan sistem konvensional (Zaidan & Ibrahim, 2024).

Berbagai negara maju telah aktif memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)* di sektor militer, sehingga menjadikan teknologi ini sebagai komponen penting dalam strategi pertahanan dan keamanan nasional mereka, serta menjadi tolak ukur baru untuk menilai daya saing militer suatu negara. Saat ini negara-negara yang berhasil mengembangkan ekosistem *AI* militer dianggap unggul secara strategis (Zúñiga et al., 2024).

Meskipun demikian, persaingan ini tidak hanya sebatas pengembangan teknologi *AI* semata, melainkan juga mencakup perebutan pengaruh dalam membentuk kebijakan, standar, norma dan regulasi internasional terkait penggunaannya, terutama untuk kepentingan di bidang militer. Dari sudut pandang geopolitik, negara-negara yang berhasil menetapkan kebijakan di panggung global akan memperoleh pengaruh yang signifikan, karena kebijakan tersebut tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga mencerminkan kepentingan strategis negara-negara yang merumuskannya (Zúñiga et al., 2024).

Di luar kepentingan nasional, pengaturan penggunaan *AI* di bidang militer sangat penting, mengingat risiko yang dapat ditimbulkannya, seperti penggunaan *AI* dalam pengembangan senjata otonom yang melanggar batas-batas etika berpotensi mengganggu stabilitas keamanan global. Oleh karena itu, tata kelola global atas penggunaan *AI* militer tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh masing-masing negara, melainkan memerlukan koordinasi dan kolaborasi internasional. Dalam konteks ini, pengembangan kebijakan keamanan, prinsip-prinsip etika dan kerangka regulasi internasional untuk penggunaan *AI* dalam bidang militer merupakan elemen penting guna memastikan penggunaannya tetap aman, bertanggung jawab dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan (Camilleri, 2024; Cha, 2024).

Dalam persaingan menentukan arah kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer, Amerika Serikat sebagai salah satu aktor berpengaruh, ikut terjun di dalamnya. Dengan kekuatan teknologi yang maju serta anggaran pertahanan yang sangat besar, Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi militer berbasis *AI*, tetapi juga aktif dalam membentuk aturan dan standar internasional mengenai penggunaannya. Kebijakan yang dibentuknya menekankan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan keamanan teknologi. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk mempertahankan posisi dan pengaruhnya di tingkat global (Habuka & Socol de la Osa, 2025).

Amerika Serikat aktif mendifusikan kebijakan yang dirumuskannya terkait penggunaan *AI* di bidang militer kepada negara sekutunya salah satunya Jepang. Upaya difusi ini didorong oleh kepentingan strategis bersama antara kedua belah pihak, dari sisi Amerika Serikat, Jepang dianggap sekutu penting di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi pengaruh dan ancaman militer Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan tersebut. Penyelarasan kebijakan penggunaan *AI* pada bidang militer Jepang memungkinkan Amerika Serikat memperkuat aliansi keamanan dengan Jepang, sehingga membentuk barisan persatuan yang lebih kokoh dalam menghadapi potensi ancaman regional. Kerja sama ini juga memfasilitasi pertukaran teknologi dan data intelijen guna memastikan standar

penggunaan yang seragam, sehingga mencegah terjadinya fragmentasi di dalam aliansi dan meningkatkan sinkronisasi sistem militer di kedua negara tersebut. Dari sudut pandang geopolitik dukungan terhadap transformasi pertahanan Jepang memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin aliansi, sekaligus mencegah Jepang beralih ke netralitas atau kemitraan lain yang berpotensi melemahkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur. Sedangkan bagi Jepang, kerja sama ini sejalan dengan reformasi mendasar dalam kebijakan pertahanannya, karena Jepang sedang berupaya meningkatkan kemampuan militernya melalui integrasi *AI*, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang telah lama menjadi landasan kebijakan luar negerinya. Hal ini juga mencerminkan komitmen Jepang terhadap “*Proactive Contribution to Peace*” sebagaimana diuraikan dalam Strategi Keamanan Nasional 2022, yang menekankan penguatan aliansi dengan Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan (Parrat, 2024).

Namun pola kerja sama yang diterapkan Amerika Serikat dalam isu ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan yang cukup signifikan. Berbeda dengan diplomasi Amerika Serikat sebelumnya yang kerap mengandalkan tekanan politik atau persaingan terbuka, pendekatan yang digunakan dalam konteks difusi kebijakan *AI* di bidang militer ke Jepang cenderung lebih persuasif dan kolaboratif, yakni melalui pembangunan norma bersama, dialog teknis, serta kerja sama penelitian antar negara yang tidak banyak ter publikasikan.

Fenomena ini menandakan munculnya bentuk diplomasi yang lebih halus dan tidak konfrontatif. Dalam konteks Hubungan Internasional, pendekatan seperti ini dikenal dengan konsep *Quiet Diplomacy*, yang merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan secara diam-diam dan umumnya berlangsung jauh dari sorotan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan ruang negosiasi yang lebih fleksibel bagi para aktor diplomasi, terutama ketika menangani isu-isu sensitif yang berpotensi memicu konflik politik atau penolakan jika dilakukan secara terbuka dan penuh tekanan (Maley, 2016).

Menurut Maley (2016), *Quiet Diplomacy* bukan hanya jenis diplomasi yang dilakukan secara berhati-hati, melainkan sebuah strategi yang di peruntukan guna

membatasi eksposur publik terhadap diplomasi tertentu. Dengan mengurangi tekanan politik dari media dan opini publik, para aktor diplomatik dapat memiliki lebih banyak ruang untuk mencapai kesepakatan, bernegosiasi dan mengeksplorasi solusi yang mungkin sulit dicapai melalui diplomasi terbuka. Dalam difusi kebijakan penggunaan *AI*, khususnya di bidang militer, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena masalah ini sering berkaitan erat dengan keamanan nasional, daya saing dan kepentingan geopolitik suatu negara. Maka, negara-negara dapat mencapai kesepakatan bertahap tanpa memperburuk dinamika kompetisi global dengan menggunakan pendekatan diplomasi yang lebih tertutup dan berbasis dialog teknis. Oleh karena itu, *Quiet Diplomacy* menjadi alat penting yang membantu Amerika Serikat dalam upaya difusi kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer Jepang.

Meskipun kajian tentang diplomasi teknologi dan tata kelola *AI* telah berkembang beberapa tahun terakhir, akan tetapi penelitian yang secara khusus membahas upaya difusi norma penggunaan *AI* di bidang militer menggunakan pendekatan yang lebih tertutup oleh Amerika Serikat terhadap Jepang masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya cenderung membahas persaingan pengembangan teknologi *AI* secara umum antar Amerika Serikat dengan negara maju lainnya.

Beberapa penelitian sebelumnya memang telah membahas perkembangan kebijakan pertahanan Jepang, termasuk dalam penggunaan *AI* di bidang militernya. Namun, penelitian tersebut cenderung menekankan faktor internal Jepang sebagai pendorong kebijakan dan tidak membahas bagaimana peran Amerika Serikat juga turut mempengaruhi kebijakan tersebut melalui jalur *Quiet Diplomacy*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana proses dan hasil dari upaya difusi kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer Jepang oleh Amerika Serikat dengan menggunakan *Quiet Diplomacy*. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dalam studi Hubungan Internasional, terutama mengenai diplomasi yang tidak konfrontatif dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi praktis untuk penggunaan *AI* di bidang militer yang lebih bertanggung jawab dan berorientasi pada stabilitas keamanan internasional.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kebijakan penggunaan *AI* militer yang dipromosikan Amerika Serikat kepada Jepang?
2. Bagaimana implementasi difusi norma penggunaan *AI* militer Amerika Serikat kepada Jepang dengan *Quiet Diplomacy*?
3. Apakah Jepang menyesuaikan norma terkait penggunaan *AI* di bidang militernya sesuai keinginan Amerika Serikat?

1.3. Ruang Lingkup Batasan

Penelitian ini dibatasi pada periode 2022-2025, yaitu masa intensif dalam interaksi diplomatik antara Amerika Serikat dengan Jepang dalam difusi norma kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer. Secara geografis penelitian ini difokuskan pada Jepang sebagai negara tujuan dari difusi norma *AI* militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada proses dan hasil dari difusi norma penggunaan *AI* militer Jepang oleh Amerika Serikat yang meliputi interaksi antar kedua negara melalui forum kerja sama dan dialog bilateral. Analisis difokuskan pada dokumen kebijakan resmi, pernyataan bersama serta kerangka kerja sama, sebagai jejak empiris yang mencerminkan sejauh mana pengaruh difusi Amerika Serikat terhadap kebijakan Jepang.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* militer yang dipromosikan oleh Amerika Serikat kepada Jepang. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Amerika Serikat menggunakan pendekatan *Quiet Diplomacy* kepada Jepang dalam proses difusi norma penggunaan *AI* militer tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan

sejauh mana Jepang menyesuaikan norma penggunaan *AI* di bidang militernya dengan norma yang dipromosikan oleh Amerika Serikat. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika difusi norma penggunaan *AI* militer melalui jalur diplomasi tertutup, serta bagaimana norma tersebut diterima dan diadaptasi oleh negara mitra.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana konsep *Quiet Diplomacy* diterapkan dalam konteks difusi norma penggunaan *AI* militer.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi negara-negara dalam membentuk norma penggunaan *AI* di bidang militer yang bertanggung jawab dan mematuhi batas etika.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual

1.5.1. *Quiet Diplomacy*

Quiet Diplomacy dipahami sebagai pendekatan diplomasi yang dilakukan melalui komunikasi tertutup, negosiasi informal dan interaksi antarpejabat yang minim eksposur publik. Berbeda dengan diplomasi koersif atau diplomasi publik yang bersifat terbuka, *Quiet Diplomacy* menekankan pada pembentukan kepercayaan, pengelolaan hubungan jangka panjang serta persuasi normatif secara halus. Pendekatan ini lazim digunakan dalam isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan resistensi politik apabila dibahas secara terbuka, termasuk isu teknologi canggih dan pertahanan/militer. Menurut Maley (2016), *Quiet Diplomacy* merupakan strategi yang mengandalkan keterlibatan langsung antar aktor melalui jalur komunikasi yang tidak terekspos publik, dengan tujuan meminimalisir eskalasi konflik serta menjaga ruang negosiasi tetap kondusif. Dalam pandangan ini, efektivitas *Quiet Diplomacy* terletak pada kemampuannya membangun

kepercayaan dan mempengaruhi preferensi aktor lain tanpa menciptakan tekanan terbuka yang berpotensi memicu penolakan.

Untuk menganalisis bagaimana pendekatan ini bekerja secara konkret, penelitian ini menggunakan empat ciri *Quiet Diplomacy* yang merujuk pada Maley (2016), yaitu pertama, mengutamakan komunikasi langsung antarpemerintah dibandingkan pernyataan atau tekanan yang disampaikan secara terbuka ke publik. Kedua, menghindari tekanan atau ancaman terbuka dan menggantinya dengan ajakan serta persuasi yang bersifat kolaboratif. Ketiga, membangun kepercayaan secara bertahap melalui keterlibatan yang berulang antar kedua pihak, bukan lewat satu peristiwa tunggal. Keempat, membatasi publikasi atas proses konsultasi yang berlangsung, di mana hanya hasil akhir atau kesepakatan umum yang disampaikan ke publik, sementara proses negosiasi di baliknya tidak diekspos secara rinci.

Dalam konteks ini, *Quiet Diplomacy* digunakan Amerika Serikat sebagai instrumen untuk mempengaruhi kebijakan Jepang terhadap penggunaan *AI* di bidang militernya tanpa tekanan langsung. Melalui dialog kebijakan tertutup, kerja sama teknis, serta mekanisme konsultasi strategis, Amerika Serikat berupaya membentuk keselarasan kebijakan yang sejalan dengan nilai dan kepentingannya. Teori ini dianggap relevan karena menjelaskan bagaimana pengaruh dapat bekerja tanpa paksaan, tetapi melalui proses persuasif dan institusional. Keempat ciri di atas menjadi acuan dalam membaca bagaimana pola interaksi Amerika Serikat dan Jepang berlangsung sepanjang proses difusi norma.

1.5.2. Norm Diffusion

Norm Diffusion dipahami sebagai proses penyebaran norma atau standar perilaku internasional dari satu aktor kepada aktor lainnya, di mana norma tersebut secara bertahap diadopsi dan diinternalisasi oleh negara-negara lain sebagai bagian dari kebijakan nasionalnya. Dalam kerangka yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998), proses ini berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu munculnya norma (*norm emergence*), penyebaran norma (*norm cascade*), dan internalisasi norma (*norm internalization*). Pada

tahap awal, norma biasanya dipromosikan oleh aktor yang memiliki kapasitas dan pengaruh besar, yang kemudian mendorong negara-negara lain untuk mengadopsinya melalui berbagai mekanisme seperti persuasi, sosialisasi, maupun interaksi.

Ketiga tahapan tersebut memiliki penanda yang berbeda satu sama lain. Pada tahap *norm emergence*, yang menjadi penanda bukan kapan norma itu pertama kali dirumuskan, melainkan kapan norma tersebut mulai diperkenalkan sebagai standar yang layak dan sah untuk diikuti negara lain oleh *norm entrepreneur*. Pada tahap *norm cascade*, norma yang sudah diperkenalkan tersebut mulai disebarkan secara aktif kepada negara-negara mitra melalui mekanisme persuasi, sosialisasi dan interaksi, sampai semakin banyak negara yang menerimanya. Sedangkan pada tahap *norm internalization*, norma tersebut sudah diterima sedemikian rupa sehingga tidak lagi dipersoalkan dan mulai dianggap sebagai standar yang seharusnya, dengan tiga indikator utama, yaitu norma sudah terlembaga ke dalam kebijakan dan praktik domestik negara penerima, norma tersebut dijalankan secara rutin sebagai kebiasaan dalam praktik kebijakan sehari-hari, dan negara penerima berubah posisi dari sekadar pengikut norma menjadi pihak yang turut mempromosikan norma tersebut ke forum internasional.

Dalam konteks ini, *Norm Diffusion* digunakan untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat menyebarkan norma penggunaan *AI* yang bertanggung jawab di bidang militer kepada Jepang, mulai dari kemunculan norma tersebut di panggung internasional, proses penyebarannya melalui interaksi bilateral, hingga sejauh mana norma itu akhirnya terinternalisasi ke dalam kebijakan dan sikap diplomatik Jepang. Konsep ini dianggap relevan karena menjelaskan apa yang sesungguhnya disebarkan oleh Amerika Serikat melalui proses diplomasi, sehingga melengkapi konsep *Quiet Diplomacy* yang menjelaskan bagaimana proses penyebaran tersebut berlangsung, baik dari segi mekanisme maupun tahapan substantifnya.

1.6. Asumsi Penelitian

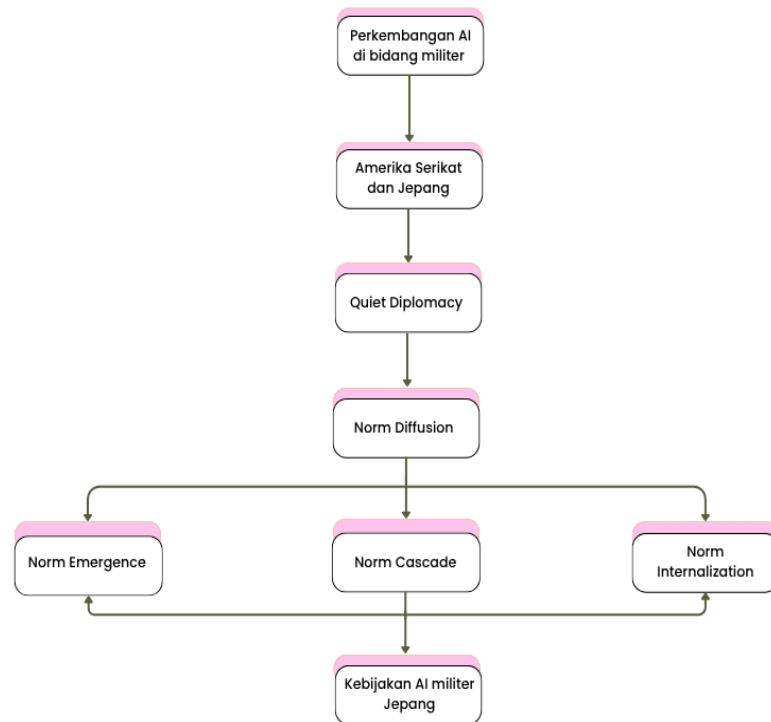
Penelitian ini menarik asumsi bahwa *Artificial Intelligence (AI)* merupakan isu strategis dalam Hubungan Internasional yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi politik dan keamanan yang signifikan. Dalam konteks ini, norma dan standar penggunaan *AI* di bidang militer dipahami tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan kepentingan, nilai dan pengaruh aktor yang terlibat dalam proses pembentukannya. Oleh karena itu, upaya Amerika Serikat dalam mendifusikan norma penggunaan *AI* militer ke Jepang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan strategis yang melatarbelakanginya.

Penelitian ini juga berangkat dari asumsi bahwa Amerika Serikat sebagai aktor dominan dalam pengembangan teknologi global memiliki kapasitas signifikan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan tata kelola *AI* di negara mitra, khususnya Jepang. Pengaruh tersebut tidak selalu dilakukan melalui tekanan terbuka, melainkan melalui pendekatan *Quiet Diplomacy* yang bersifat non konfrontatif, tertutup dan strategis, terutama dalam isu kebijakan teknologi strategis yang sensitif.

Selain itu, penelitian ini mengasumsikan bahwa perubahan kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer suatu negara bukan merupakan proses yang sepenuhnya independen, melainkan hasil dari interaksi diplomatik yang berlangsung antarnegara, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral. Dalam proses tersebut, norma dan standar internasional terkait penggunaan *AI* militer disebarkan dan dinegosiasikan secara bertahap, hingga pada akhirnya diadopsi dan disesuaikan dengan konteks kebijakan domestik masing-masing negara.

Dengan demikian, asumsi-asumsi ini menjadi landasan analitis dalam memahami bagaimana diplomasi teknologi Amerika Serikat dengan instrumen *Quiet Diplomacy* berperan dalam membentuk arah kebijakan penggunaan *AI* di bidang militer Jepang dalam periode penelitian.

1.7. Kerangka Analisis



Gambar 1. 1 Kerangka Analisis

Kerangka analisis dalam penelitian ini berangkat dari fenomena berkembangnya *AI* khususnya di bidang militer, yang kemudian memunculkan dimensi persaingan baru antar negara-negara besar dalam upaya membentuk norma dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan risiko.

Dalam dinamika tersebut, Amerika Serikat dan Jepang menjadi dua aktor utama yang saling berkaitan, di mana Amerika Serikat memosisikan Jepang sebagai target strategis penyebaran kebijakan *AI* militer, mengingat posisinya sebagai sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Indo Pasifik. Untuk mencapai hal

tersebut, Amerika Serikat menggunakan *Quiet Diplomacy* sebagai instrumen utama dalam proses difusi norma penggunaan *AI* militer kepada Jepang.

Untuk memahami bagaimana proses difusi tersebut berlangsung, penelitian ini menggunakan konsep *Norm Diffusion* yang menjelaskan tahapan norma tersebut muncul dan menyebar secara bertahap, mulai dari *Norm Emergence*, dilanjutkan dengan *Norm Cascade*, hingga akhirnya mencapai tahap *Norm Internalization*. Ketiga tahapan ini saling berkaitan satu sama lain dan menjadi mekanisme yang digunakan Amerika Serikat untuk menanamkan norma penggunaan *AI* militer yang bertanggung jawab kepada Jepang, hingga proses ini akhirnya mengarah pada satu output utama, yaitu kebijakan *AI* militer Jepang setelah masuknya pengaruh dari Amerika Serikat.

Secara keseluruhan, kerangka analisis ini menunjukkan bahwa perkembangan *AI* khususnya di bidang militer menciptakan ruang kompetisi baru yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya dan mempertahankan hegemoninya melalui strategi *Quiet Diplomacy*, yang berlangsung melalui tahapan *Norm Diffusion* secara bertahap hingga akhirnya membentuk kebijakan *AI* militer Jepang.

Secara keseluruhan, kerangka analisis ini menunjukkan bahwa perkembangan *AI* khususnya di bidang militer, menciptakan ruang kompetisi baru yang dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya dan mempertahankan hegemoninya melalui strategi *Quiet Diplomacy* dalam proses difusinya, melalui interaksi dengan negara mitra secara bertahap.